ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)

(Skripsi)

Oleh

RIA JAYANTI

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)

Oleh

RIA JAYANTI

Tingginya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 mencapai angka 96,3 %. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor apa yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi Data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik random sampling (acak bebas) karena jumlah populasi pada penelitian ini berjumlah 1897 orang, maka peneliti menetapkan sampel menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan (margin of error) 10 %, maka didapat sampel sebanyak 95 orang sebagai sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan pengukuran Instrument Penelitian yaitu Skala Likert. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis statistik deskriptif dan teknik analisis Regresi Linear Sederhana dengan bantuan *Software IBM SPSS Version 23*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor tertinggi yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 adalah faktor kepercayaan terhadap pemerintah dan faktor kesadaran politik. Tingginya faktor kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh kedekatan emosional masyarakat dan pasangan calon kepala daerah, dan untuk faktor Kesadaran Politik dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan politik masyarakat.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi masyarakat

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE HIGH PARTICIPATION OF THE COMMUNITY IN THE ELECTION OF LOCAL HEAD (Case Study of Trimulyo Village, Surian Building District, West Lampung Regency, 2017)

By

RIA JAYANTI

The high level of community participation in regional head elections in Trimulyo Village, Gedung Surian District, West Lampung Regency in 2017 reached 96.3%. The purpose of this study was to find out what factors influenced the high community participation in regional head elections in Trimulyo Village, Gedung Surian District, West Lampung Regency in 2017. The types of data collected in this study included primary data and secondary data. The sampling technique in this study was to use random sampling technique (free random) because the total population in this study amounted to 1897 people, the researchers determined the sample using the Slovin formula with a margin of error (margin of error) of 10%, then a sample of 95 was obtained people as the sample in this study using the Research Instrument measurement, namely the Likert Scale. While the data collection techniques used are observation, questionnaires, interviews, and documentation. The data analysis technique that the authors use is descriptive statistical analysis and Simple Linear Regression analysis techniques with the help of IBM SPSS Version 23 Software. The results of the study show that the highest factors influencing people's political participation in the election of Regional Heads in Trimulyo Village, Gedung Surian District, West Lampung Regency in 2017 is the factor of trust in the government and the factor of political awareness. The high trust factor in the government is influenced by the emotional closeness of the community and regional head candidate pairs, and for the Political Awareness factor it is influenced by the level of public political knowledge.

Keywords: Regional Head Election, Community Participation

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)

Oleh

RIA JAYANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi	: **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)**
Nama Mahasiswa	: *Ria Jayanti*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1716021009**
Program Studi	: **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.	**Darmawan Purba, S.I.P., M.IP.**
NIP. 19611218 198902 1 001	NIP. 198110601 201012 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

Sekretaris/Anggota : **Darmawan Purba, S.I.P., M.IP.**

Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 November 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 November 2022
Yang Membuat Pernyataan

Ria Jayanti
NPM. 1716021009

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ria Jayanti dilahirkan di Suka Jaya, Lampung Barat pada tanggal 06 Januari 1999, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Heplin (Alm) dan Ibu Hasnawati. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Sebarus, diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Liwa pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Liwa pada tahun 2017. Tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi Anggota Organisasi Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) FISIP Unila. Penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Januari dan Februari 2020 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gedung Rejo Sakti, Tulang Bawang Kemudian pada bulan Juli 2020 Penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) selama 30 hari di Kantor Desa Ciasihan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat .

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah 3:286)

"Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya "

(QS. At- Talaq 65:3)

"Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya"

(Walt Disney)

"Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit"

(Confusius)

"Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat waktunya tiba"

(Ria Jayanti)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah mengaruniakan berbagai macam kenikmatan baik itu kenikmatan lahir maupun batin, yang senantiasa mendampingiku, menolongku, dan menganugerahkan pemahaman atas ilmu-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling agung dan mulia yakni baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di Dunia hingga ke Yaumil Akhir kelak.

Dengan ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayah dan Ibuku Tercinta”

Terima kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas merawat, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkanku dalam menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan, memberi semangat di segala keterbatasan, dan senantiasa mendukung dengan sepenuh hati di setiap langkahku.

”Kakak-kakakku Tersayang”

Hellalia, Helta Yunita dan Rio Ramadani

Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staff, dan Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah kalian lakukan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SAN WACANA

Puji syukur Penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan Skripsi dengan judul " *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)"* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus pembimbing utama dalam proses penyelesaian skripsi;
3. Bapak Darmawan Purba, S.I.P.,M.I.P., selaku pembimbing kedua dalam proses penyelesaian skripsi;
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP, selaku Dosen Penguji Utama.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D., selaku Dosen pembimbing akademik;
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Kedua Orang tua tercinta saya Bapak Heplin (Alm) dan Ibu Hasnawati yang senantiasa memberikan Dukungan, semangat dan bantuan baik moril maupun materil;
8. Ketiga Kakak saya Helalia, Helta Yunita, dan Rio Ramadani yang selalu mendukung dan memberi bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan studi;
9. Teman- teman GAJEBO (Siti Nurhalimah, Rokiah, Defi Yustika, Tensi dan Laras Sari), Nur Suci Wulandari , Seli Yulia Ningsih, dan Genk Lahay (Melia Rosa, Nadia Putri, Tiara Elifia Rista dan Veti Utami) yang selalu memberikan dukungan, Nasehat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi;
10. Ozon Alamsyah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil.

11. Seluruh Responden yang telah membantu dalam proses penelitian dan juga kepada Kepala Desa Trimulyo beserta jajarannya yang sudah berkenan memberikan izin untuk melakukan penelitian dan masyarakat Desa Trimulyo yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan. Semoga Desa Trimulyo menjadi Desa yang lebih maju dan lebih baik, dan senantiasa dipimpin oleh Kepala Desa yang jujur, adil, dan amanah, Serta masyarakatnya bisa lebih maju, makmur, dan sejahtera.
12. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih semoga kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT dengan kebaikan berlebih.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung

Ria Jayanti

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 11
1.3. Tujuan Penelitian 11
1.4. Manfaat Penelitian 11

II. TINJAUAN PUSTAKA **13**

2.1. Pemilihan Umum Kepala Daerah 13
2.1.1. Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 15
2.1.2. Pelaksanaan Pilkada..... 16
2.1.3. Sejarah Singkat Pilkada..... 18
2.1.4. Manfaat/Fungsi Pilkada..... 19
2.2. Partisipasi Politik 20
2.2.1. Partisipasi..... 20
2.2.2. Partisipasi Politik..... 22
2.2.3. Tipologi Partisipasi Politik..... 25
2.2.4. Prinsip-prinsip Partisipasi Politik..... 27
2.2.5. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik..... 27
2.2.6. Fungsi Partisipasi Politik..... 28
2.2.7. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik..... 28
2.3. Konsep Perilaku Memilih..... 32

2.3.1 Pendekatan Perilaku Memilih..... 35
2.4. Kerangka Pikir 37

III. METODE PENELITIAN 39

3.1. Tipe Penelitian 39
3.2. Lokasi Penelitian..... 39
3.3. Jenis dan Sumber Data..... 40
3.4. Variabel Penelitian..... 40
3.5. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 40
3.6. Populasi dan Sampel 47
3.7. Teknik Pengumpulan Data..... 48
3.7. Teknik Pengolahan Data 51
3.8. Teknik Analisis Data..... 52

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 55
A. Sejarah singkat Desa Trimulyo..... 55
B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Trimulyo..... 56
C. Demografi..... 58
D. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya..... . 61

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Deskriptif Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah..... 66
A. Karakteristik Responden..... 66
B. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah..... 70
5.2. Analisis Regresi Linear Sederhana Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah 87
5.3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana..... 96
5.4. PEMBAHASAN..... 111

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan..... 118
6.2. Saran..... 119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir Penelitian..... 38

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gedung Surian.....5
2. Jumlah Pemilih Kecamatan Gedung Surian Berdasarkan Jenis Kelamin.....5
3. Pengguna Hak Pilih Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian.....6
4. Penelitian Sejenis Terdahulu.....7
5. Operasional Variabel Dalam Indikator.....46
6. Daftar Nama Kepala Desa di Desa Trimulyo.....56
7. Jumlah Populasi Per Wilayah.....58
8. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo Berdasarkan Usia tahun 2022.....59
9. Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Desa Trimulyo.....60
10. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....61
11. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo Berdasarkan Jenis Agama.....63
12. Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Trimulyo.....64
13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....66
14. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....67
15. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....67
16. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....68
17. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.....69
18. Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi.....69
19. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Organisasi.....70
20. Hasil Analisis Deskriptif Pernyataan Responden Terhadap Kesadaran Politik.....72
21. Hasil Analisis Deskriptif Pernyataan Responden Terhadap Kepercayaan Terhadap Pemerintah.....74

22. Hasil Analisis Deskriptif Pernyataan Responden terhadap Status Sosial Ekonomi.....77
23. Hasil Analisis Deskriptif Pernyataan Responden Terhadap Afiliasi Politik Orang Tua.....78
24. Hasil Analisis Deskriptif Pernyataan Responden Terhadap Pengalaman Organisasi.....80
25. Hasil Kumulatif Pernyataan Responden Terhadap 5 (lima) Faktor yang mempengaruhi.....82
26. Hasil Analisis Deskriptif Pernyataan Responden Terhadap Partisipasi Politik.....84
27. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat berdasarkan Aspek Kesadaran Politik.....87
28. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Aspek Kepercayaan terhadap Pemerintah.....89
29. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat berdasarkan Aspek Status Sosial dan Ekonomi.....91
30. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat berdasarkan Aspek Afiliasi Politik Orang Tua.....92
31. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat berdasarkan Aspek Pengalaman Organisasi.....93
32. Rekapitulasi Analisis Partisipasi Masyarakat (Variabel Y) dalam Pemilihan Kepala Daerah.....94

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen tonggak penting dalam mempresentasikan kedaulatan dan suara rakyat untuk mewujudkan negara yang Demokrasi. Pemilu merupakan gerbang utama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Pemilu adalah praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*).

Negara yang melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya sudah baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau bahkan tidak mampu melaksanakan pemilu dengan baik, ditandai dengan terjadinya berbagai kecurangan dan diskriminasi, maka negara tersebut dinilai sebagai negara yang anti demokrasi. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya di wujudkan dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Febriadi, 2018). Salah satu bentuk Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yakni ikut serta dalam pemberian suara atas dipilihnya secara langsung anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Salim, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota legislatif yang terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan disebut sebagai DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam untuk pemilihan eksekutif, meliputi pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikotanya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam mengatur Pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada, Undang-undang ini sesuai Pasal 22E UUD 1945 yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam konteks eksplisit dimulai dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan ditambah dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 Tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting pada Negara demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas penyelenggaraan Negara seperti kegiatan pemilihan kepala daerah. Sejak diterbitkan UU Nomor 10 Tahun 2016 pemerintah pusat menjadikan Pilkada sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis. Hal ini menunjukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan kebijakan daerah.

Salah satu daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak adalah Kabupaten Lampung Barat tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017 lalu. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat partisipasi masyarakat Kecamatan Gedung Surian relatif tinggi yakni mencapai 85,5 %. Peserta Pilkada tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 2 pasangan calon, yaitu pasangan H. Parosil Mabsus, S.Pd dan Drs. H. Mad Hasnurin dan pasangan Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E.,M.E.c dan H. Ulul Azmi Soltiansa, S.H.

Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 dimenangkan oleh pasangan H. Parosil Mabsus, S.Pd dan Drs. H. Mad Hasnurin dengan perolehan suara 92.124 (57,01%), sementara pasangan Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E.,M.E.c dan H. Ulul Azmi Soltiansa, S.H. mendapatkan perolehan suara 69.470 (42,99%), sementara untuk perolehan suara pasangan H. Parosil Mabsus, S.Pd dan Drs. H. Mad Hasnurin dengan perolehan suara 7.533 (79,98%), sementara pasangan Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E.,M.E.c dan H. Ulul Azmi Soltiansa, S.H. mendapatkan perolehan suara 1886 (20,02%) *(Sumber: kpu.go.id).*

Berdasarkan data jumlah keseluruhan pemilih atau suara yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat berjumlah 216.639 suara, yang telah menggunakan hak pilih berjumlah 163.326 suara dan yang tidak menggunakan hak pilih berjumlah 53.313 ,suara sah berjumlah 161.320 dan suara tidak sah berjumlah 1.837 suara, sedangkan jumlah keseluruhan pemilih atau suara yang terdaftar di Kecamatan Gedung Surian berjumlah 11.380 suara yang terdiri dari 5.813 pemilih laki-laki dan 5.567 pemilih perempuan, dimana yang telah menggunakan hak pilih berjumlah 9.729 suara, terdiri dari 5.041 pemilih laki-laki dan 4.686 pemilih perempuan. Dari data diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada di kabupaten Lampung Barat sangat tinggi, *(Sumber: kpu.go.id).*

Kecamatan Gedung Surian merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Gedung surian mempunyai tingkat partisipasi masyarakat paling tinggi dibandingkan kecamatan yang lain yakni mencapai 85,5%. Kecamatan Gedung Surian terdiri dari 5 Desa/Pekon yaitu Cipta Waras, Gedung Surian, Mekar Jaya, Pura Agung, dan Trimulyo. Masing-masing desa merupakan daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di setiap desanya terutama Desa Trimulyo. Tingkat partisipasi masyarkat mencapai 96,3% dengan perolehan suara pasangan H. Parosil Mabsus, S.Pd dan Drs. H. Mad Hasnurin dengan perolehan suara 1.649 (87,85%), sementara pasangan Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E.,M.E.c dan H. Ulul Azmi Soltiansa, S.H. mendapatkan perolehan suara 228 (12,15%). Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Gedung Surian Serta Perolehan suara masing masing pasangan calon yang terdapat di kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gedung Surian

No	Desa	Pemilih		Suara		Hasil	
		Pemilih	Partisipasi	Sah	Tidak Sah	No 1	No 2
1.	Cipta Waras	1.557	90,8%	1.401	12	1.226	175
2.	Gedung Surian	2.076	87,6%	1.592	30	1164	428
3.	Mekar Jaya	2.382	89,5%	2.117	15	1766	339
4.	Pura Mekar	3.395	72,7%	2.444	25	1728	716
5.	Trimulyo	1.970	96,3%	1.877	20	1649	228

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat (2022)

Berdasarkan data pada tabel 1, Desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi adalah Desa Trimulyo dengan tingkat partisipasi mencapai 96,3%, dan diurutan terakhir ada Desa Pura Mekar dengan tingkat partisipasi 72,7%.

Perbandingan Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Kecamatan Gedung Surian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa	Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
		Laki-laki	**Perempuan**	**Laki-laki**	**Perempuan**
1.	Cipta Waras	774	783	708	704
2	Gedung Surian	1.084	992	948	870
3	Mekar Jaya	1.209	1.173	1.102	1.029
4	Pura Mekar	1.718	1.677	1.288	1.181
5	Trimulyo	1.028	942	995	902
	Jumlah	5.813	5.567	5041	4.686

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Berdasarkan data pada tabel 2 , menunjukkan bahwa perbandingan antara Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di kecamatan Gedung Surian jumlahnya seimbang, meskipun untuk jumlah pengguna hak pilih laki-laki sedikit lebih tinggi daripada pemilih perempuan, namun jumlah tersebut tidak terlalujauh diantara keduanya.

Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian terdiri dari 11 Dusun, yaitu Dusun Air Dingin 1, Air Dingin 2, Air Dingin 4, Air Dingin 5, Air Dingin 6, Air Dadapan 1, Air Dadapan 3, Talang Panjang 1, Talang Panjang 2, Talang Panjang 3, dan Talang Panjang 4. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017, Masyarakat Desa Trimulyo memilih di lima TPS yang ada di Desa Tri Mulyo. Tabel dibawah ini menjelaskan mengenai Jumlah Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat, data tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pengguna Hak Pilih Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian

No.	NO.TPS	Pengguna Hak Pilih		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	1	241	219	460
2.	2	250	219	469
3.	3	154	143	297
4.	4	194	177	371
5.	5	156	144	300
		995	902	1897

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat (2021).

Berdasarkan tabel data pada tabel 3 diketahui bahwa masyarakat Desa Trimulyo memilih di 5 (lima) TPS, Jumlah Pengguna Hak Pilih adalah sebanyak 1897 orang yang terdiri dari 995 orang pemilih laki-laki dan 902 orang pemilih perempuan.

Untuk memperkuat penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu yang sejenis sebagai pembanding. Penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada telah dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4 Penelitian sejenis terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian
1.	Wiwik Sri Rahayu (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kota Makassar
2.	Siti Zuriati (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Tahun 2015
3.	Ahclak Asmara Yasa (2018)	Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)
4.	Edi Supriono (2018)	Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)
5.	Syaiful Huda (2014)	Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2021

Wiwik Sri Rahayu (2019) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor faktor yang Mempengaruhi menunjukkan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kota Makassar tingkat partisipasi masyarakatnya sudah cukup tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Laikang faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak

Tahun 2018 Di Kota Makassar yaitu faktor kesadaran politik jika dilihat dari hasil penelitian dan juga menjadi faktor terbesar yang paling mempengaruhi tingkat Partisipasi politik masyarakat.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada, dan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kota Makassar dan juga meneliti tentang faktor apa yang terbesar yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, sementara Penulis ingin mengkaji mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian).

Siti Zuriati (2017) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi Timur tahun 2015 adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor politik, tetapi yang lebih mempengaruhi adalah faktor Politik, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik masyarakat adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara pemilu dan banyaknya masyarakat yang berada di luar daerah seperti bekerja dan yang menuntut ilmu.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada, dan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat

dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi Timur tahun 2015, sementara penulis ingin meneliti mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian). Penulis ingin mengkaji mengenai Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingginya Partisisipasi masyarakat dalam pilkada.

Ahclak Asmara Yasa (2018) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertama, bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada dikelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam proses pemilihan kepala daerah, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, Kedua bahwa partisipasi politik masyakat pemilih pemula dikelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) yang dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa daerah mereka lebih baik lagi. Kurangnya pemahaman politik serta proses penyampaian informasi mengenai politik merupakan salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pemilih dalam pilkada, dan perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada Fokus Penelitian dimana penelitian terdahulu memfokuskan pada Masyarakat Pemilih Pemula, sementara penulis ingin meneliti pada masyarakat umum di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Edi Supriono (2018) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Mesuji untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi masyarakat Kabupaten Mesuji tampaknya kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada, dan perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang dianalisis yaitu penelitian ini mengenai faktor yang yang mempengaruhi Turunnya Partisipasi masyarakat Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017, sementara Penulis ingin meneliti mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian).

Syaiful Huda (2014) hasil penelitian ini menyatakan bahwa respon masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dalam Pemilukada pada tahun 2012, cenderung menerima *money politic.* Meski demikian, sebagian mereka juga tetap ingin berparisipasi meskipun tidak ada praktek money politik. Jika dilihat lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam pemilukada dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1) faktor hubungan masyarakat dengan calon (4%), faktor *money politic* (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada, dan perbedaannya adalah Penulis ingin mengkaji mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya Partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian).

Berdasarkan latar belakang yang penulis ungkapkan di atas yakni mengenai tingginya partisipasi politik masyarakat Desa Tri Mulyo dalam Pilkada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah, Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor apa yang mempengaruhi tingginya tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis :
   a. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan pemerintahan.
   b. Sebagai bahan acuan, informasi dan data atau referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
   a. Manfaat untuk Pemerintah

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan strategi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dimasa mendatang.

b. Manfaat Untuk Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui pentingnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam politik salah satu caranya dengan ikut serta pada proses Pemilihan Umum Kepala Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu pemilihan kepala pemerintahan tingkat wilayah di Kabupaten/Provinsi oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi demi perubahan pada suatu daerah demi kesejahteraaan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih sangat penting keikutsertaannya dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada sebagai wujud negara yang demokratis. Dalam sistem Demokrasi, Pemilu di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan secara prosedural (Ginting 2018).

Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"

Joko J Prihatmoko menyatakan bahwa : " Pemilihan Kepala daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/wakil gubernur, maupun Bupati/Wakil Bupati atau walikota/wakil walikota".

Pilkada merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, legitimate, dan peka terhadap kepentingan masyarakat (Yusdianto,dalam Sa'ban (2019)). Secara praktis, pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggotaa DPRD.

Pemilihan Kepala Daerah diartikan sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala (Rahmatunnisa, 2017). Setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) yang berbunyi : "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daersh secara langsung di atur dalam undang –undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 24 ayat (5) yang berbunyi "kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan".

Agustino (2014) menyatakan bahwa: "Pilkada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di area lokal, karena mekanisme ini hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politik keseharian *(days to*

days politics) justru yang berlangsung setelah Pilkada itu berlangsung sehingga datang pemilihan selanjutnya".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan negara yang demokratis. Pilkada berupa partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya untuk memilih seorang pemimpin, pilkada yang baik dilakukan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.1.1. Syarat-syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat;
4. Usia minimal 30 tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terjerat kasus hukum (di Penjara);
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat daerah yang bersangkutan;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secar perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain, riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
15. Tidak dalam status pejabat Kepala Daerah.

2.1.2. Pelaksanaan Pilkada

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Tujuan utama pilkada adalah rakyat dapat menentukan sendiri pemimpinnya yang dianggap mampu membawa perubahan dan kebaikan terhadap seluruh masyarakat pada daerah tersebut. Menurut Alemika (dalam liando 2016) Suatu pemilu yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi diantaranya: 1) adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) adanya partisipasi masyarakat; 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Keberadaan partisipasi

masyarakat dalam pilkada merupakan sesuatu yg krusial oleh karena itu partisipasi warga negara harus ada meskipun keterlibatannya banyak berhenti pada proses pemilihan (Marijan, dalam Sutrisno).

Pemilihan yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Memilih antara tawaran kebijakan yang berbeda dan partai atau kandidat yang saling bersaing;
2. Meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan ; dan
3. Mentransformasikan konsepsi simbolik (kedaulatn rakyat) dalam tindakan riil yg sesungguhnya.

Proses pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daersh secara langsung di atur dalam undang –undang nio 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 65 dan 66, di mana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa masa persiapan pilkada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksakan melalui masa persiapan,dan tahap pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan pilkada meliputi:

a. Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
b. Pendaftaran calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
c. Penetapan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
d. Kampanye;
e. Masa tenang;
f. Pemungutan suara;
g. Penghitungan suara;
h. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesaan dan pelantikan.

2.1.3. Sejarah Singkat Pilkada

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada pertama kali diselanggarakan pada bulan Juni 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian dari rezim Otonomi Daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sejak berlakunya undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Namun, dalam perjalanannya kemudian, penggunaan kata "Pilkada" tenggelam seiring munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di mana pemilihan kepala daerah tidak lagi masuk ke dalam rezim otonomi daerah melainkan bagian dari rezim pemilu. Jadi, istilah Pilkada berganti baju menjadi Pemilukada.

Istilah Pemilukada pertama kali digunakan pada perhelatan politik Pemilukada di DKI Jakarta pada 2007 silam. Itulah sebabnya penyelesaian sengketa kedua rezim itu berbeda. Kalau Pilkada sengketanya diselesaikan di Mahkamah Agung (MA), maka di rezim Pemilukada sengketanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, di dalam undang –undang ini istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Secara eksplisit jelas bahwa pada UU Nomor 22 Tahun 2007, istilah Pemilukada adalah istilah yang tepat digunakan dalam rentang waktu 2007 hingga 2011 karena dalam ayat tadi secara umum menyebutkan Kepala Daerah, sementara dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 juga secara gamblang dan lebih spesifik menyebutkan jabatan kepala

daerah, yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Olehnya itu, saat ini (2012 – sekarang) istilah yang tepat kita gunakan adalah Pilgub, bukan lagi Pemilukada. KPU telah menyebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pilgub. Pun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilkot). Setali tiga uang dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian disingkat Pilpres.

2.1.4. Manfaat/ Fungsi Pilkada

Menurut Agustino (2014) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berfungsi untuk, Pertama, terwujudnya legitimasi politik pimpinan daerah. Hal ini karena kepala daerah yang dipilih mendapatkan mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung langsung oleh suara pemilih yang nyata *(real voters).* . Pemberian suara dalam pemilu merupakan mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Kedua, Pilkada langsung mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketika seorang kandidat terpilih sebagai kepala daerah, maka mereka akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Ketiga, optimaliasi *equilibirium checks and balances* antara lembaga-lembaga negara dapat berujung pada pemberdayaan masyarakat lokal. Keempat, pilkada langsung akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama yang berkaitan dengan kualitas partisipasi publik. Kelima, Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat dan Keenam, Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk tturut serta menetapkan kebijakan publik.

2.2 Partisipasi Politik

2.2.1. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu prinsip mendasar dari sistem *Good Governance.* Partisipasi juga merupakan salah satu aspek penting dalam negara demokrasi. Partisipasi merupakan sebuah bagian dari proses politik dalam upaya menentukan keputusan dan kebijakan negara untuk menyejahterahkan masyarakatnya.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi menurut Suharno (dalam Masa, 2021) partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan perilaku turut serta berperan dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi menurut Soerjono Soekanto adalah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.

Partisipasi juga memiliki pengertian *"a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them"* (Deepa Naryan, dalam Supriono), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi dapat bersifat individual atau kelompok, bisa terjadi secara spontan ataupun secara terorganisir, dapat terjadi disertai dengan kekerasaan ataupun secara damai. Partisipasi identik dengan kegiatan politik masyarakat yang dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik yaitu dengan cara memberikan dukungan hak suara dalam proses politik.

Huntington membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Conyers (1994, dalam Liando) , terdapat tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi juga merupakan hak demokrasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kebijakan pemerintah yang mensejahterakan.

2.2.2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Partisipasi Politik merupakan landasan negara Demokrasi dan erat hubungannya dengan Legitimasi yang tujuannya ingin agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerin tahan. Partisipasi politik masyarakat Menurut Suryadi merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat

negara yang nantinya akan mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan yang akan mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).

Menurut Miriam Budiarjo, menjelaskan Bahwa "Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif didalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara secara langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Sudijono Sastroatmodjo mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik (dalam Arniti, 2020).

Khamisi memberi pengertian yang luas mengenai partisipasi politik, ia mengatakan bahwa partisipasi politik adalah hasrat individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai- partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri (dalam Muhaling, 2014).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (dalam Miriam Budiharjo).

Menurut Huntington dan Nelson (Huntington dan Nelson, 1994: 4-8), konsep partisipasi politik memiliki beberapa aspek definisi inti: *Pertama*, mencakup kegiatan-kegiatan (perilaku politik yang nyata) tetapi bukan sikap-sikap. *Kedua*, yang menjadi perhatian adalah kegiatan politik warga negara, atau lebih tepat lagi perseorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. *Ketiga*, yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. *Keempat*, mencakupsemua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek tersebut (tidak tergantung dari berhasil atau tidaknya kegiatan partisipasi politik). *Kelima*, mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau yang disebut sebagai partisipasi otonom (*autonomous participation*), akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar sipelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau partisipasi yang dimobilisasikan (*mobilized participation*).

Partisipasi politik identik dengan kegiatan politik masyarakat dalam sebuah proses politik, berupa kegiatan memberikan dukungan dan hak suara yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Partisipasi

dapat berjalan dengan baik dengan adanya sebuah keleluasaan, kesediaan, kepercayaan, dan juga kemampuan. Partisipasi politik bermanfaat untuk: (1) memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik; (2) menunjukan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik (Syamsudin Haris, 2014).

Setiap warga negara mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam proses mengevaluasi dan juga menentukan sosok pemimpinnya, sehingga partisipasi politik yang berupa keikutsertaan warga negara dalam Pilkada menjadi sangat penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando dkk, 2015).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan Partisipasi Politik merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan segala keputusan kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

2.2.3. Tipologi Partisipasi Politik

Ramlan Surbakti mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

1. Partisipasi Aktif, merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output dan input politik. Partisipasi aktif meliputi mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan

2. alternatif kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin dalam sistem pemerintahan.
3. Partisipasi Pasif, merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Kegiatan yang meliputi Partisipasi Pasif adalah mentaati pemerintah, menerima, dan melaksnakan saja setiap keputusan pemerintah.

Menurut Gabriel Almond (dalam Hendrik, 2010) Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif konvensional dan partisipasi kolektif non konvensional. Bentuk partisipasi kolektif yang konvensional adalah berupa pemberian suara/voting, aktivitas diskusi politik, kegiatan kampanye, aktivitas membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik atau administrative. Sedangkan bentuk partisipasi kolektif non konvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, Konfrontasi dan mogok.

Cholisin membedakan Partisipasi politik menjadi empat kategori yaitu: Partisipasi Politik Aktif, Partisipasi politik pasif tertekan (Apatis), Partisipasi politik militant radikal, dan Partisipasi politik pasif. Partisipasi Politik aktif adalah apabila oknum mempunyai kepekaan politik dan meyakinkan terhadap pemerintah atas. Sebaliknya apabila kepekaan politik politik dan keyakinan pemerintah kurang maka keterlibatan politiknya cenderung pasif tertekan (apatis). Keterlibatan militant radikal ada apabila kepekaan politik atas tetapi keyakinan kepada pemerintah sangat kurang, namun apabila kepekaan politik sangat kurang tetapi keyakinan kepada pemerintah sangat banyak maka keterlibatan ini dikatakan tidak aktif (pasif).

2.2.4. Prinsip-prinsip Partisipasi Politik

Adapun Prinsip-prinsip Partisipasi Politik yang tertuang dalam panduan pelaksanaan pendekatan partisipatif yang disusun oleh *Department For International Development (DFID)* adalah:

a. Cakupan;
b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*);
c. Transparansi;
d. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/ Equal Pewership*);
e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responbility*);
f. Pemberdayaan (*Empowerment);*
g. Kerjasama.

2.2.5. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk Partisipasi seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah Voting, baik itu untuk memilih calon para wakil rakyat atau untuk memilih wakil negara. Rush Althoff dalam Tarigan (2009) mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

a. Menduduki jabatan Politik atau administratif;
b. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik;
c. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik;
d. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik (*quasi-political*);
e. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi-politik;
f. Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya;
g. Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal;
h. Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting).

2.2.6. Fungsi Partisipasi Politik

Robert Lane mengatakan bahwa terdapat empat macam fungsi partisipasi politik antara lain:

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi;
2. Sebagai sarana memuaskan kebutuhan penyesuaian sosial;
3. Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus;
4. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.

Menurut Syamsudin Haris (dalam Sa'ban) terdapat tiga fungsi dari partisipasi politik, diantaranya:

1. Memberikan dukungan terhadap penguasa dan pemerintahan serta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan akan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai suatu tantangan penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadinya perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sitem politik, misalnya melalui pemogokan, huru hara, dan kudeta.

2.2.7. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Ramlan Surbakti membagi lima faktor yang dianggap mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, sebagai berikut (Surbakti, 2010):

1. Kesadaran Politik, yaitu Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

2. Kepercayaan Terhadap pemerintah, ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan
3. Status Sosial dan Status Ekonomi, Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan, atau dengan kata lain status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. atau dengan kata status sosial adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau masyarakatyang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
4. Afiliasi Politik Orangtua, Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Afiliasi Politik Orang Tua menjadi faktor pertimbangan dalam partisipasi politik, dimana terdapat kesejajaran hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pilihan anak. Menurut Soekanto menjelaskan bahwa bimbingan dari para orang tua dibutuhkan oleh para remaja dalam rangka meraih impiannya (dalam Mukhti Arif).

5. Pengalaman Organisasi, Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan. Pengalaman organisasi merupakan satu faktor penunjang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, hal ini berkaitan dengan kehidupan seseorang yang pernah terlibat dalam setiap kegiatan organisasi sosial maupun politik, sehingga orang tersebut memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang tidak pernah merasakan organisasi.

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif, sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif. Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orangtua dan pengalaman berorganisasi.

Menurut Damsar dalam buku Sistem Politik Indonesia, selain status sosial ekonomi ada Variabel lain yang mempengaruhi partisipasi politik seperti aspek gender, budaya politik, kemimpinan informal, dan tingkat kekecewaan terhadap realitas yang ada, termasuk realitas pemerintahan dan politik.

Menurut Myron Weimer (dalam Wiwik) partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Modernisasi;
2. Terjadi perubahan struktur kelas;
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern;
4. Adanya konflik antar pemimpin-pemimpin politik;

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya.

Milbrath menyebutkan terdapat empat faktor utama yang mendorong orang untuk partisipasi dalam kehidupan politik yaitu:

1. Adanya faktor perangsang politik, dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi seringnya mengikuti diskusi politik melalui media massa ataupun diskusi formal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang –orang yang berwatak sosial mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, ekonomi, polituk, sosial budaya hamkamrata, biasanya mau terlibat dalam kegiatan politik.
3. Faktor karakter sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial mempngaruhi sikap,perspsi dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan mnghargai nilai-nilai keterbukaan kejujuran keadilan dan lain-lain tentu mau biasanya untuk turut serta berpartisipasi dalam bidang politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat orang-orang dengan senang hati mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Lingkungan politik yang demokratis membuat orang merasa aman, bebas dan nyaman untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, berbeda halnya dengan lingkungan politik yang totaliter yang diwarnai dengan aktivitas-aktivitas kekerasan dan brutal justru akan dengan sendirinya membuat masyarakat menjauh dan enggan untuk berpartisipasi.

2.3. Perilaku Memilih

Secara Konseptual, Perilaku memilih atau Voting Behavior selanjutnya disebut voting behavior diartikan sebagai keikutsertaan warga masyarakat pada setiap pemilu yang merupakan tindakan membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih (Surbakti). Secara teoritik tentang perilaku memilih merupakan suatu studi yang bertujuan mengungkapkan beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan seseorang cenderung memilih suatu partai, kader partai, atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilu atau pilkada.

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Menurut Ramlan Surbakti perilaku memilih adalah: "Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not vote*) didalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila voters memutuskan untuk memilih (*to vote)* maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Jack C Plano memposisikan perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.

Pemberian suara atau *voting* secara umum dapat diartikan sebagai, "sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil. Dalam konteks ini menurut Roth (2009) perilaku pemilih dapat dijelaskan melalui sejumlah pendekatan beberapa diantaranya adalah: (1) Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan ini ahir dari studi-studi yang dilakukan oleh seorang sosiolog, Paul F. Lazersfeld, bersama rekan kerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University Bureau of Applied Social Science, sehingga kemudian mahzab ini lebih dikenal dengan Mahzab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*).

Roth (2009) lebih lanjut mengemukakan pendekatan ini sesungguhnya bertumpu pada beberapa aspek hubungan kemasyarakatan seseorang dengan lingkungan sosialnya. Karena itu setiap manusia selalu terikat di dalam berbagai lingkaran sosialnya, antara lain (a) status social ekonomi, semisal: tingkat pendidikan, jabatan dan jenis pekerjaan, pendapatan, dan kelas sosial; (b) agama, (c) etnik dan wilayah tempat tinggal semisal: kota, desa, daerah pesisir, ataupun pegunungan). Dengan begitu studi perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis dapat dijelaskan dengan beberapa indikator berikut: (a) kesamaan status sosial (jabatan, pekerjaan, pendapatan dan pendidikan); (b) kesamaan gender (jenis kelamin); dan (c) usia, (d) kesamaan suku, agama, ras dan golongan, (e) tempat tinggalnya. Sedangkan pendekatan psikologis menurut Roth (2009) yang berusaha menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Pendekatan ini berusaha menjelaskan melalui relasi tiga aspek psikologis, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu-isu politik.

Dalam pendekatan yang sama, Ambardi, Mujani, & Liddle (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam pemilu atau pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (*political efficacy*). Dengan demikian perilaku memilih seseorang dapat dipengaruhi oleh keterkaitan tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek

Pemilu, seperti; (a) keterkaitan seseorang dengan partai politik, (b) orientasi seseorang terhadap isu-isu politik, (c) orientasi seseorang terhadap kandidat.

Berkaitan dengan perilaku pemilih, Firmansyah (2010) kemudian mencoba merumuskan beberapa tipe pemilih ke dalam empat bagian, yakni (a) pemilih rasional; (b) pemilih kritis; (c) pemilih tradisional; (d) pemilih skeptis. Pandangan yang tidak jauh berbeda diungkapkan juga oleh Pamungkas (2009: 74-75), bahwa secara teoritik terdapat tiga penjelasan dalam memahami perilaku politik pemilih, yakni: (a) penjelasan party identification, atau yang lebih dikenal dengan pendekatan psikologis; (b) penjelasan sosiologis; (c) penjelasan pilihan rasional. Selain tiga tipe ini menurut Pamungkas (2009: 75), masih ada penjelasan patron-klien, yaitu perilaku memilih yang sangat tergantung pada bagaimana perilaku elit panutannya (patron).

Perilaku pemilih dalam memilih dan memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau voting secara umum dapat diartikan sebagai; sebuah proses di mana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan consensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil. Perilaku politik *(political behavior)* adalah suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya, antara lain: pengertian respons emosianal berupa dukungan maupun apatis kepada pemerintah, respons terhadap perundang-undangan, dan lain-lain. Jadi, dengan demikian perilaku para pemilih atau pemberi suara dalam pemilihan umum. Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik (Beddy, 2013).

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaks si dapat dicermati akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik (Surbakti, 2010)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku memilih merupakan suatu tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam memberikan suara dalam suatu Pemilihan Umum/Pilkada secara langsung.

2.3.1 Pendekatan Perilaku Memilih

Saiful Mujani, R.William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya Kuasa Rakyat, perilaku memilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan Sosiologi, Psikologi, dan Pilihan Rasional.

1. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial – usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar belakang keluarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya – memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pilihan-pilihan politik .Menurut Afan Gaffar indikator pendekatan sosiologis yaitu: pendidikan, jabatan/pekerjaan, jenis kelamin, usia.
2. Pendekatan psikologi, menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat karena produk dari sosialisasi yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan

sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali mereka memilih. Menurut Adman Nursal indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan ini yaitu:

a. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
b. Identifikasi Partai,yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

3. Pendekatan pilihan rasional pilihan rasional menganggap seseorang memilih calon atau partai apabila calon atau partai tersebut dipandang dapat membantu pemilih memenuhi kepentingan dasarnya yaitu kehidupan ekonomi oleh karena itu pendekatan ini juga disebut pendekatan ekonomis, melalui pendekatan ini pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang ada, misalnya tiaptiap parpol yang ada, tiap-tiap kandidat yang ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada. Lalu, dilihat untung atau ruginya bagi individu. Pada akhirnya individu akan memilih yang memberi keuntungan paling besar dan kerugian paling kecil bagi dirinya. M enurut Anthony Downs dalam pendekatan pilihan rasional ini, dipaparkan dua orientasi yang menjadi daya tarik pemilih, yaitu orientasi isu dan kandidat.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan kerangka konseptual yang memaparkan dimensi-dimensi utama dari penelitian, faktor-faktor kunci, variabel-variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk nara si atau grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam penyusunan metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian ini kerangka konseptual Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.

Partisipasi masyarakat sebagai pemilih sangat penting keikutsertaannya dalam mensukseskan penyelenggaraan pilkada sebagai wujud negara yang demokratis. Dalam penelitian ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat Desa Trimulyo dalam pilkada, yakni:

1. Kesadaran Politik.
2. Kepercayaan Terhadap pemerintah.
3. Status Sosial dan Status Ekonomi.
4. Afiliasi Politik Orangtua,
5. Pengalaman Organisasi.

Dari beberapa faktor-faktor tersebut penulis berusaha mengukur faktor mana saja yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017. Dari uraian di atas mengenai kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

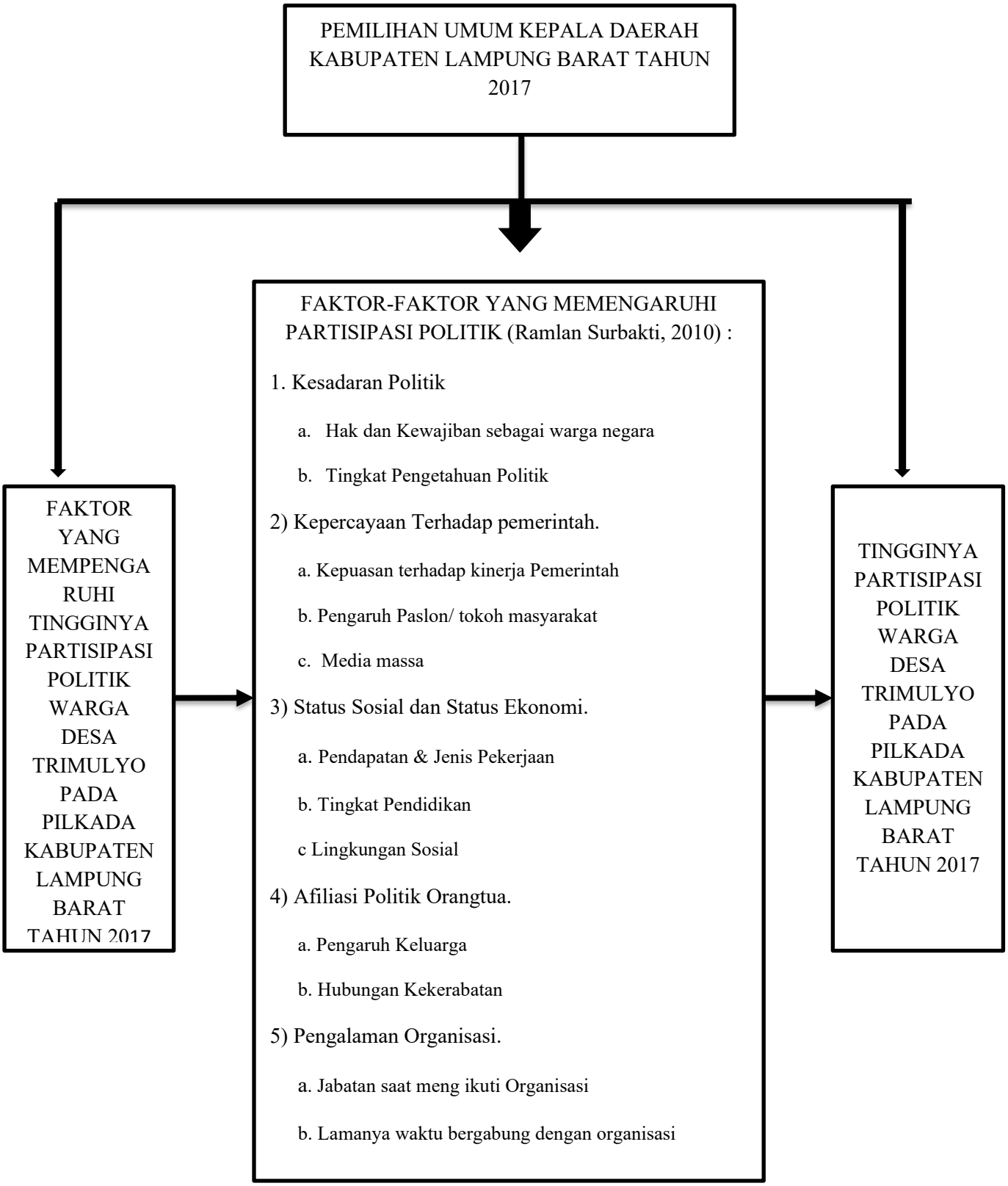

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan alasan Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (Barlian, 2016). Dalam penelitian ini deskriptif yang dimaksud adalah deskriptif kuantitatif karena gambarannya menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan adanya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan akan dilaksanakan agar dapat memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan tingginya persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada di Desa tersebut.

3.3.Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian atau lapangan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari responden melalui kuesioner, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain seperti kepustakaan untuk melengkapi data primer. Adapun Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa Undang undang, Peraturan Daerah, Dokumen, Artikel, Jurnal dan Referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber ini juga dimaksudkan untuk memeroleh data sekunder yang dapat mendukung pemahaman atau permasalahan yang menjadi fokus kajian dan dalam proses analisis hasil penelitian.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Variabel X (Faktor- Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat) dan Variabel Y (Partisipasi Masyarakat).

3.4. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

3.4.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut,

a. Partisipasi merupakan keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan

   Partisipasi juga merupakan hak demokrasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kebijakan pemerintah yang mensejahterakan.

   Partisipasi Politik merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan segala keputusan kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

b. Pilkada (pemilihan kepala daerah) merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan negara yang demokratis yang dilakukan secara demokratis berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
c. Perilaku memilih merupakan suatu tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam memberikan suara dalam suatu Pemilihan Umum/Pilkada secara langsung.

3.4.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan komponen penelitian yang yang memberikan informasi mengenai bagaimana caranya mengukur variabel sehingga peneliti dapat memahami variabel yang akan diteliti.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi (X)**

   a. Kesadaran Politik

   Semakin tinggi tingkat kesadaran politik masyarakat biasanya tingkat partisipasi pun akan meningkat dan begitupun sebaliknya jika kesadaran politik rendah maka biasanya tingkat partisipasi pun akan menurun.Kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai warga negara yang baik.

   b. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

   Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah biasanya tingkat partisipasi pun akan meningkat dan begitupun sebaliknya jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah biasanya tingkat partisipasi pun akan menurun. Karena jika pemerintah yang sebelumnya memberikan pemerintahan yang baik maka akan berdampak baik pula pada pemerintah yang selanjutnya.

   c. Status sosial dan ekonomi

   Dimana tingkat pendidikan dan pekerjaan dikalangan masyarakat memengaruhi partisipasi masyarakat seperti pada kalangan atas yang berpendidikan tinggi biasanya antusias dalam ikut diskusi-diskusi politik yang membuat mereka ikut dalam berpartisipasi karena adanya kewajiban mereka sebagai pejabat-pejabat negara , dan masyarakat pada kalangan menengah yang biasanya ikut dalam kampanye politik karena adanya dorongan dari seseorang, dan masyarakat kalangan bawah yang yang biasanya acuh tak acuh pada pemilihan karena mereka berfikir tidak akan mempengaruhi kehidupan pribadi mereka.

d. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik. Afiliasi Politik Orang Tua menjadi faktor pertimbangan dalam partisipasi politik, dimana terdapat kesejajaran hubungan antara pekerjaan orang tua dengan pilihan anak. Menurut Soekanto menjelaskan bahwa bimbingan dari para orang tua dibutuhkan oleh para remaja dalam rangka meraih impiannya (dalam Mukhti Arif).

e. Pengalaman Organisasi

Karena adanya pengalaman dari seseorang untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan politik, dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya mengikuti kegiatan beorganisasi dan juga sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi formal, serta adanya berita-berita di televisi ataupun sosial media bahkan dari masyarakat sekitar.

2. Partisipasi politik (Y)

a. Menggunakan hak suara

Sebagai warga negara yang baik pentingmya memberikan hak suara untuk menentukan nasib daerah yang akan dipimpin oleh pemimpin yang terpilih kedepannya, Proses memberikan suara dari seseorang pemilih kepada salah satu calon kandidat, seorang pemilih harus melalui beberapa proses mulai dari pendataan hingga masuk dalam DPT kemudian dapat memberikan suara.

b. Mengikuti diskusi politik

Tukar fikiran dalam pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi yang dilakukan baik secara formal maupun informal, baik diskusi yang dilakukan di warkop yang biasanya dilakukan oleh kaum milenial , di televisi, disekolah, dirumah, dan dimana saja yang membentuk diskusi-diskusi politik yang diadakan sehingga bisa mengetahui perkembangan politik sehingga ,masyarakat bisa mengetahui perkembangan poltik saat ini.

c. Mengkuti kampanye politik

Keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif, kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh calon kandidat melalui tim suksesnya yang menggelar acara ini sehingga masyarakat bisa hadir untuk menyaksikan calon kandidat menyampaikan visi dan misinya secara langsung didepan masyarakat. Ini sebuah daya tarik bagi calon kandidat untuk memproleh suara dari masyarakat.

3.4.3. Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ho : tidak ada Pengaruh Variabel Penelitian (X) terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat (Y) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)

2. H1 : ada Pengaruh Variabel Penelitian (X) terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat (Y) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017)

Tabel 5. Operasional Variabel dalam Indikator

No.	Variabel X	Variabel Y
1.	**Kesadaran Politik** Indikator: a. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara b. Tingkat Pengetahuan Politik	
2.	**Kepercayaan Terhadap Pemerintah** Indikator: a. Kepusaan terhadap kinerja Pemerintah b. Pengaruh Paslon/ tokoh masyarakat c. Media Massa	**Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada** Indikator: a. Menggunakan Hak Suara b. Mengikuti Diskusi Politik c. Mengikuti Kampanye Politik
3.	**Status Sosial dan Status Ekonomi** Indikator: a. Pendapatan b. Jenis Pekerjaan c. Tingkat Pendidikan d. Lingkungan Sosial	
4.	**Afiliasi Politik Orangtua** Indikator: **a.** Pengaruh Keluarga **b.** Hubungan Kekerabatan	
5.	Pengalaman Organisasi Indikator: a. Jabatan saat meng ikuti Organisasi b. Lamanya waktu bergabung dengan organisasi.	

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Menurut Akbar, Husaini dan Purnomo (2008) Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas. Populasi merupakan keselurahan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan dengan jumlah 1.897 pemilih.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi narasumber data yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Usman dan Purnomo menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Purnomo, 2008:43). Adapun yang menjadi sampel adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian. Sampel yang akan digunakan ditentukan menggunanakan Rumus Slovin yang menghitung banyaknya sampel minimum suatu populasi.

Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi keselahan (*error tolerance*) yang diinginkan, yaitu sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%

$$n = \frac{1897}{1 + 1897.(0{,}01)}$$

$$n = \frac{1897}{1 + 18{,}97}$$

$$n = \frac{1897}{19{,}97}$$

$$n = 94{,}99$$

Hasil yang diperoleh melalui rumus slovin adalah 94,99 yang kemudian dibulatkan menjadi 95, sehingga sampel yang peneliti butuhkan untuk melakukan penelitian faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 95 orang masyarakat yang berada di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian (Pabundu Tika, 2005). Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data yang diambil melalui teknik observasi adalah data tentang gambaran umum daerah penelitian.

3.6.2. Kuesioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab menggunakan bentuk *cheklist*. Kuisioner merupakan teknik pengumpuan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2011:142). Soentoro (2015:82), kuesioner adalah instrumen penelitian yang berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur data yang diteliti. Sedangkan Pasalong (2013:141), kuesioner adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh responden itu sendiri..

Kuisioner yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang disertai alternatif jawaban. Menurut Riduwan (2005:71) kuisioner tertutup (kuisioner berstruktur) adalah kuisioner yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (×) atau tanda *checklist* (√). Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif. *Skala Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat atau responden di Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat tentang Variabel Faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik masyarakat dan variabel partisipasi politik. Faktor yang memengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada diukur menggunakan skala likert dengan membuat kuesioner terdiri dari 5 tingkatan pertanyaan positif yaitu: (a) sangat setuju, (b) setuju, (c) kurang setuju, (d) tidak setuju dan (e) sangat tidak setuju, dan dengan skor sebagai berikut :

b. Sangat setuju, untuk setiap jawaban (a) mendapat skor 5
c. Setuju, untuk setiap jawaban (b) mendapat skor 4.

3. Kurang setuju (netral), untuk setiap jawaban (c) mendapat skor 3
4. Tidak setuju, untuk setiap jawaban (d) mendapat skor 2
5. Sangat tidak setuju, untuk setiap jawaban (e) mendapat skor 1

Untuk dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap suatu objek, responden diberi kesempatan untuk menilai masing-masing kriteria dengan cara memberikan tanda silang (√) pada salah satu huruf a,b,c,d,e. Kuesioner penelitian yang dibuat peneliti akan diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum dan sesudah penelitian. Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan/kevalidan kuesioner penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/konsistensi kuesioner penelitian. Peneliti akan melakukan uji validas dan uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan *Software IBM SPSS version 23.* Pengujian validitas cukup dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel}. Jika nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan valid, begitupula sebaliknya. Data juga dikatakan valid jika nilai sig.(2-tailed) data $\leq$ 0.05. Pengujian Reliabilitas cukup dengan membandingkan r_{alpha} atau angka cronbach alpha dengan nilai 0,7, Jika r_{alpha} atau angka cronbach alpha $\geq$ 0,7 maka indikator atau pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel, begitupula sebaliknya.

3.6.3. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara penulis dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan wawancara secara terstruktur. Selain itu, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Lampung Barat.

Wawancara peneliti lakukan untuk memperkuat data dalam penelitian ini, ditunjukan kepada Masyarakat Desa Trimulyo yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pilkada Kabupaten Lampung Barat. Wawancara terkait faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pilkada Kabupaten Lampung Barat..

3.6.4. Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi, penulis mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, dan sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh dari hasil penyebaran Kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, adapun tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyerdahanakan seluruh data yang terkumpul, dan menyajikannya dalam bentuk susunan yang rapi. Data yang diolah berdasarkan pada kuesioner yang telah disebarkan dan dijawab oleh masyarakat Desa Trimulyo sebagai responden. Adapun langkah yang dilakukan dalam pengolahan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan dicek kemudian diperiksa kelengkapan data dan jawaban kuesioner. Lalu dari jawaban tersebut dikelompokkan antara pertanyaan pertanyaan umum dengan pertanyaan tentang persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan kepala desa.

b. Prosentasi Data

Prosentasi data dalam penelitian ini menggunakan prosentasi dengan tujuan untuk melihat perbandingan besar kecilnya frekuensi jawaban

angket yang diberikan responden, karena jawaban tiap kuesioner berbeda. Adapun rumus prosentasi yang digunakan adalah perhitungan rumus interval sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} X\ 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : Frekuensi jawaban dibagi jumlah pertanyaan

N : Jumlah responden

Data yang telah dihitung prosentasinya kemudian dianalisis dengan menggunakan skala likert. Faktor yang memengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada diukur menggunakan skala likert dengan membuat kuesioner terdiri dari 5 tingkatan pertanyaan positif yaitu: (a) sangat setuju, (b) setuju, (c) kurang setuju, (d) tidak setuju dan (e) sangat tidak setuju, dan dengan skor sebagai berikut :

1. Sangat setuju, untuk setiap jawaban (a) mendapat skor 5
2. Setuju, untuk setiap jawaban (b) mendapat skor 4
3. Kurang setuju (netral), untuk setiap jawaban (c) mendapat skor 3
4. Tidak setuju, untuk setiap jawaban (d) mendapat skor 2
5. Sangat tidak setuju, untuk setiap jawaban (e) mendapat skor 1

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana informasi yang telah diperoleh ditafsirkan dengan melewati proses yang cukup panjang untuk mendapatkan hasilnya. Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga data dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2012). Peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data, diantaranya:

1. Teknik analisis Statistik Deskriptif

   Teknik analisis Statistik Deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data kuisioner yang telah terkumpul dari responden penelitian. Teknik analisis Statistik Deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhirungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta penghitungan persentase dengan rumus sebagai berikut;

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

% : Persentase

n : Skor yang diperoleh

N : Skor ideal

Data yang sudah dipresentasikan lalu dideskripsikan, hasil persentase dapat digolongkan sebagai berikut:

Persentase Jawaban

1.	80% - 100%	(Sangat Baik)
2.	60% - < 80%	(Baik)
3.	40% - < 60%	(Cukup Baik)
4.	20% - < 40%	(Kurang Baik)
5.	0% - < 20%	(Sangat Kurang Baik)

2. Teknik analisis Regresi Linear Sederhana

   Teknik analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk melihat besaran pengaruh variabel X terhadap Variabel Y, digunakan pula untuk membangun persamaan dan menggunakannya untuk membuat perkiraan (*Prediction*). Adapun rumus persamaan Linear Sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = a + b \times$$

   Keterangan:

   Y : Partisipasi politik

   X : Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

   a : Konstanta

   b : koefisien regresi

Analisis regresi pada penelitian ini akan menggunakan bantuan *Software IBM SPSS version 23.* Hasil regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

a. Jika nilai P value (sig) ≥ 0,05, maka Ho diterima dan H1ditolak.
b. Jika nilai P value (sig) ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

A. Sejarah Singkat Desa Trimulyo

Desa Trimulyo adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Desa Trimulyo merupakan pemekaran dari Desa Gunung Terang. Pada tahun 1984 sesuai perkembangan penduduk, maka Desa Trimulyo resmi memisahkan diri dari Desa Gunung Terang.

Desa Trimulyo pada mulanya merupakan daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau di atas tanah berbukit-bukit yang ditumbuhi banyak pepohonan dan semak yang masih lebat, sehingga mata pencaharian utama penduduknya adalah sektor pertanian. Pada saat itu hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai menghuni di daerah tersebut.

Nama Trimulyo berasal dari dua kata, yaitu kata “Tri” dan “Mulyo”. Kata “Tri” mempunyai makna yang menunjukkan kondisi desa yang terdiri dari tiga wilayah utama Kedusunan , yaitu Air Dingin, Talang Panjang, dan Air Dadapan. Sedangkan kata “Mulyo” berasal dari bahasa jawa yang berarti Mulya yaitu berkecukupan baik di bidang sandang, pangan, papan dan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Jadi, kata Trimulyo mempunyai arti “Kesatuan Tiga Wilayah untuk Menuju Satu Kemulyaan”.

Sebagian besar wilayah Pekon Trimulyo (sekitar 70%) merupakan perkebunan Kopi dan Lada. Selain itu, lahan pertanian pisang dan sayur mayur lainnya menjadi kegiatan usaha pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dengan lahan yang cukup subur dan sumber air yang cukup melimpah memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam.

Mayoritas penduduk desa beragama Islam dan ada juga yang beragama Kristen/Protestan. Penduduk Pekon Trimulyo terdiri dari beragam suku diantaranya Jawa, Sunda, Lampung, Semendo dan lain-lain.

Berikut ini merupakan nama-nama Peratin/Kepala Desa yang pernah memimpin di Pekon Trimulyo berturut-turut.

Tabel 6. Daftar Nama Kepala Desa di Desa Trimulyo

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Juhri	Kepala Desa	1984-1986	Penjabat
2.	M. Asmuni	Kepala Desa	1986-1999	Definitif
3.	Imam. S	Pj.Peratin	1999-2005	Pejabat
4.	Umi Muhayanah	Peratin	2005-2011	Definitif
5.	Buchori	Pj.Peratin	2011	Pejabat
6.	Ismail	Peratin	2011-2017	Definitif
7.	Buchori	Peratin	2017-sekarang	Definitif

Sumber : Diolah peneliti dari dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Trimulyo

Desa Trimulyo secara administratif adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. Desa Trimulyo mempunyai luas wilayah ±1.143 Ha, terbagi atas 3 (Tiga) wilayah utama Kedusunan , yaitu Air Dingin, Talang Panjang, dan Air Dadapan.

Desa Trimulyo terbagi lagi menjadi 11 (sebelas) Dusun/Pemangku, yaitu: Air Dingin 1, Air Dingin 2, Air Dingin 4, Air Dingin 5, Air Dingin 6, Talang Panjang 1, Talang Panjang 2, Talang Panjang 3, Talang Panjang 4, Air Dadapan 1, dan Air Dadapan 3 ; dengan jumlah penduduk sebanyak 3273 jiwa: Laki-laki 1683 jiwa dan Perempuan sebanyak 1557 jiwa dari (1012 KK). Kantor Desa Beralamat di Jln. R.Sumardi Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Desa Trimulyo berjarak ± 5 km dari kantor Kecamatan Gedung Surian. Jarak Desa Trimulyo dari kantor Bupati Kabupaten Lampung Barat sekitar 72 km. Waktu tempuh menuju pusat Kota Kecamatan sekitar 15 menit, sedangkan waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten sekitar 120 menit.

Adapun Batas-batas administratif Pemerintahan Desa Trimulyo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekon Cipta Waras dan Pekon Gedung Surian
- Sebelah Selatan : Pekon Sirna Galih
- Sebelah Barat : Pekon Sinar Jaya dan Desa Sidodadi
- Sebelah Timur : Pekon Cipta Waras dan Pekon Sirna Galih

Dilihat dari topologi dan kontur tanah, sebagian besar wilayah Desa Trimulyo berwilayah perbukitan dan bergelombang tepatnya di Lereng Bukit Barisan Selatan, sebagian berupa daratan (lahan kering), dan sebagian lagi berupa sawah dan perkebunan dengan ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut, dengan suhu udara berkisar 18^{0} – 24^{0} Celcius. Curah hujan rata-rata 2500-3250 mm/tahun, dengan jumlah bulan basah 8-9 bulan dan kering 3-4 bulan dalam setahun serta tingkat kelembapan 70-85 %.

C. Demografi

Aspek Demografi menjelaskan mengenai jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan wilayah tempat tinggal, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Jumlah penduduk Desa Trimulyo adalah sebanyak 3273 jiwa terdiri dari Laki-laki 1683 jiwa dan Perempuan sebanyak 1557 jiwa dari (1012 KK). Jumlah penduduk per wilayah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Jumlah Populasi Per Wilayah

No	Wilayah	Kepala Pemangku	KK	L	P	L+P
1	Air Dingin 1	Ely Murdani	119	190	176	366
2	Air Dingin 2	Fitriyah	90	162	133	294
3	Air Dingin 4	Slamet Riyadi	77	130	123	253
4	Air Dingin 5	Budi Heriyanto	128	205	204	409
5	Air Dingin 6	Adi Santoso	103	170	149	319
6	Talang Panjang 1	Suyanto	68	104	113	217
7	Talang Panjang 2	Khoirul Mutakin	82	136	119	255
8	Talang Panjang 3	Lusi Dewi Puspita	85	145	136	281
9	Talang Panjang 4	Wahyu Wicaksono	99	176	142	318
10	Air Dadapan 1	Siswono	85	132	141	273
11.	Air Dadapan 3	Jasri	76	134	121	255
Total			1012	1683	1557	3273

Sumber : Diolah peneliti dari Dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukan bahwa total jumlah penduduk di Desa Trimulyo adalah sebanyak 3273 jiwa yang terdiri dari 1683 jiwa laki-laki dan 1557 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1012. Tabel diatas juga menjelaskan

bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat pada wilayah Air Dingin 5 dengan jumlah penduduk sebanyak 409 jiwa yang terdiri dari 205 laki-laki dan 204 perempuan dan 128 Kepala Keluarga. Sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah terletak di Pemangku/Dusun Tl. Panjang 1 dengan jumlah penduduk 217 jiwa yang terdiri dari 104 lakilaki dan 113 perempuan dengan 68 Kartu Keluarga (KK).

Tabel 8. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo berdasarkan Usia Tahun 2022

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	00-04 Tahun	107	145	252
2.	05-10 Tahun	156	122	278
3.	11-16 Tahun	176	134	310
4.	17-20 Tahun	127	117	244
5.	21-25 Tahun	100	118	218
6.	26-30 Tahun	124	120	244
7.	31-35Tahun	152	168	320
8.	36-40 Tahun	164	140	304
9.	41-45 Tahun	139	135	274
10.	46-50 Tahun	121	102	223
11.	51-55 Tahun	81	84	165
12.	56-60 Tahun	74	70	144
13.	61-65 Tahun	71	60	131
14.	66-70 Tahun	53	31	84
15.	71-75 Tahun	25	20	45
16.	75+ Tahun	23	14	37
	Jumlah	1693	1580	3273

Sumber : Diolah peneliti dari Dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada usia 31-35 tahun yang terdiri dari 152 laki-laki dan 168 perempuan. Dari data tersebut Pekon Trimulyo didominasi usia produktif yaitu 15-60 Tahun dan usia non produktif yaitu usia 0-15

tahun dan 60 tahun sampai seterusnya. Dikarenakan banyaknya jumlah usia produktif sehingga untuk kategori pemberdayaan di Desa Trimulyo masuk kategori untuk diadakan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Desa Trimulyo

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/Belum sekolah	555
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	374
3.	Tamat SD/Sederajat	1172
4.	Tamat SMP/Sederajat	624
5.	Tamat SMA/Sederajat	468
6.	Tamat Diploma I/II	9
7.	Tamat Akademi/Diploma III	16
8.	Tamat Diploma IV/Strata I	54
9.	Tamat Strata II	1
10.	Tamat Strata III	0
	Jumlah	3273

Sumber : Diolah peneliti dari Dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa masing rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Trimulyo. Jumlah masyarakat yang tidak tamat SD mencapai 374 orang, kemudian lulusan SD sebanyak 1172 orang, untuk yang melanjutkan ke jenjang SMP hanya 624 yang hanya setengahnya dari lulusan SD tersebut, untuk masyarakat lulusan SMA juga mengalami penurunan hanya 468 orang dan untuk masyarakat yang melanjutkan ke pendidikan D1 ,D2 ,D3, D4/S1, S2 dan S3 hanya beberapa orang saja tidak ada seperempat dari jumlah penduduk yang ada di Pekon Trimulyo.

Rendahnya tingkat pendidikan bukan karena ketidakmampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya terkadang banyak sekali orang-orang yang mempunyai harta atau kebun luas lebih memilih untuk bertani dari pada sekolah karena masih banyak

masyarakat yang berpikir menghamburkan uang untuk sekolah yang pada akhirnya tujuan sekolah adalah untuk mencari uang. Padahal di kabupaten Lampung Barat pemerintahnya telah mengupayakan 53 sekolah gratis mulai dari SD,SMP dan SMA. Tujuannya agar mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, selain itu pikiran masyarakatnya dapat terbuka dalam pentingnya pendidikan dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut.

D. Keadaan Sosial Ekonomi, Agama dan Budaya

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi Masyarakat Desa Trimulyo Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai Petani, dikarenakan faktor geografis di daerah tersebut sangat subur selain itu juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, buruh dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/Tidak bekerja	650
2.	Mengurus Rumah Tangga	569
3.	Pelajar/Mahasiswa	609
4.	PNS	15
5.	POLRI	2
6.	Pedagang	1
7.	Petani/Pekebun	1219
8.	Karyawan Swasta	9
9.	Karyawan Honorer	6
10.	Buruh	4
11.	Mekanik	2
12.	Guru	21

13.	Bidan	1
14.	Sopir	1
15.	Perangkat Desa	4
16.	Wiraswasta	151
17.	Lainnya	8
	Jumlah	3273

Sumber : Diolah peneliti dari Dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Trimulyo sebagian besar berprofesi sebagai Petani/Pekebun dengan jumlah masyarakat mencapai 1219 orang. Kemudian sebanyak 650 orang Belum/Tidak bekerja, sebanyak 609 orang berprofesi sebagai Pelajar/Mahasiswa, 569 orang Mengurus Rumah Tangga, 151 orang berprofesi sebagai Wiraswasta, 21 orang sebagai Guru, 15 orang berprofesi sebagai PNS, 9 orang Karyawan Swasta, 6 Orang Karyawan Honorer, 4 orang Buruh dan 4 perangkat Desa, 2 orang POLRI dan 2 orang berprofesi sebagai Mekanik, 1 orang Bidan, 1 orang Sopir, dan 8 orang berprofesi lainnya.

2. Kondisi Keagamaan

Penduduk di Desa Trimulyo Mayoritas beragama Islam sehingga dalam pelaksanaan adat istiadat dan budaya selalu berkaitan dengan agama islam.Secara akulturasi budaya upacara-upacara keagamaan Islam seringkali diadakan bergandengan dengan keunikan tradisi masyarakat. Kentalnya ajaran agama di Desa Trimulyo memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap sesama. Brerikut merupakan jumlah penduduk Desa Trimulyo berdasarkan Agama yang dianutnya.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Desa Trimulyo berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3256
2.	Kristen	12
3 .	Katholik	3
Jumlah		3322
Belum Mengisi		2
Total		3273

Sumber : Diolah peneliti dari Dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat memeluk agama islam, oleh sebab itu maka tempat ibadah yang ada di desa Trimulyo hanya masjid dan satu gereja. Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Pekon Trimulyo adalah pengajian, mulai dari pengajian mingguan yang dilakukan setiap hari Jum'at. Pengajian bulanan yang dilakukan pada hari senin minggu kedua dan majelis dzikir yang dilakukan secara bergilir di setiap pemangku yang dilakukan setiap hari Jum'at minggu ketiga. Selain pengajian kegiatan keagamaan lainnya yaitu yasinan rutin setiap malam Jum'at yang dilakukan secara bergilir di tiap Pemangku. Dengan adanya acara-acara tersebut merupakan cara untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat dan meningkatkan iman serta menambah ilmu pengetahuan mengenai agama yang dianut. Masyarakat juga sering melakukan pengajian dalam rangka memperingati hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj.

3. Kondisi Adat Istiadat

Desa Trimulyo adalah salah satu desa atau pekon yang masih sangat kental dengan nilai adat istiadat dan keseniannya. Banyaknya jenis adat yang sudah mendarah daging dan diyakini oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Selamatan Rajab.

5.1.1.3.2. Selamatan Ruwah.

5.1.1.3.3. Selamatan Lebaran Syawal.

5.1.1.3.4. Selamatan Lebaran Haji.

5.1.1.3.5. Selamatan Suroan (1 Muharram).

4. Kondisi Sosial Budaya

Desa Trimulyo Sangat menjunjung tinggi nilai sosial budaya, hal ini terlihat dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan rutinan setiap minggunya, kemudian gotong royong dalam acara Tasyakuran maupun kegiatan lainnya. Dalam hal budaya seperti seni bela diri/pencak silat di Pekon Trimulyo juga terdapat paguyuban yaitu pencak silat dan jaranan yang selalu tampil di acara seperti khitanan, acara-acara besar seperti HUT RI, tampil di acara tahunan di kabupaten bertempatan pada HUT Lampung Barat, dan acara-acara lainnya.

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan formal di desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau disebut dengan Peratin. Peratin di Pekon Trimulyo dalam melaksanakan pekerjaannya dibantu oleh staf pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa, enam orang kepala urusan dan sebelas orang kepala dusun. Enam kepala urusan yang dimaksud yaitu meliputi kepala urusan keuangan (kaur keuangan), kepala urusan umum dan Administrasi (kaur umum), kepala urusan perencanaan (kaur perencanaan), kepala urusan Pelayanan (Kaur Pelayanan), kepala urusan pemerintahan (kaur pemerintahan), dan kepala urusan kesejahteraan rakyat (kaur kesra).

Tabel 12. Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Buchori, S.P	Peratin
2.	Bandrol Sugiarto	Sekretaris Desa
3.	Rina Utami, S.Si	Kepala Urusan Keuangan
4.	Supriadi	Kepala Urusan Umum dan Administrasi
5.	Faut Asmanudin, S.Hi	Kepala Urusan Perencanaan
6.	Muhamad Pauzi	Kepala Urusan Pelayanan
7.	Nur Halimah	Kepala Urusan Pemerintahan
8.	Hadi Waluyo, A.Md	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
9.	Ely Murdani	Kepala Pemangku Air Dingin 1
10.	Fitriyah	Kepala Pemangku Air Dingin 2
11.	Slamet Riyadi	Kepala Pemangku Air Dingin 4
12.	Budi Heriyanto	Kepala Pemangku Air Dingin 5
13.	Adi Santoso	Kepala Pemangku Air Dingin 6
14.	Suyanto	Kepala Pemangku Talang Panjang 1
15.	Khoirul Mutakin	Kepala Pemangku Talang Panjang 2
16.	Lusi Dewi Puspita	Kepala Pemangku Talang Panjang 3
17.	Wahyu Wicaksono	Kepala Pemangku Talang Panjang 4
18.	Siswono	Kepala Pemangku Air Dadapan 1
19.	Jasri	Kepala Pemangku Air Dadapan 3

Sumber : Diolah peneliti dari Dokumen Resmi Desa Trimulyo, tahun 2022

VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (studi kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (studi kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017) adalah Kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan ekonomi, Afiliasi Politik orang tua dan Pengalaman organisasi.

2. Berdasarkan Hasil Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017), Faktor tertinggi yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah Faktor kesadaran Politik dengan nilai skor rata-rata sebesar 4,4 (Sangat Setuju), kemudian faktor tertinggi kedua adalah faktor Kepercayaan terhadap Pemerintah dengan nilai skor rata-rata sebesar 4,11 (Setuju), untuk faktor pengalaman organisasi nilai skor rata-rata sebesar 3,71 (Setuju), Faktor selanjutnya yang cukup berpengaruh adalah faktor Status Sosial dan Ekonomi dengan nilai skor rata-rata sebesar 2,98 (Cukup Setuju), dan faktor yang mempunyai pengaruh terendah adalah faktor Afiliasi Politik Orang Tua dengan nilai skor rata-rata sebesar 2,27 (Tidak Setuju) Berdasarkan hasil diatas sesuai dengan teori Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (2010) bahwa semakin tinggi kesadaran

politik dan kepercayaan terhadap pemerintah maka partisipasi cenderung aktif dan begitupun sebaliknya.

3. Berdasarkan hasil Uji Regresi Linear sederhana Faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dari hasil analisis adalah kesadaran politik dengan kriteria penilaian yang baik. Variabel kesadaran politik (X) merupakan variabel yang paling mempunyai pengaruh terhadap variabel Partisipasi (Y)

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas,dari hasil penelitian dilapangan penulis dapat memberikan saran mengenai penelitian analisis faktor yang mempengaruhi Tingginya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (studi kasus Desa Trimulyo Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017), yaitu Perlunya ditingkatkan lagi oleh masyarakat diskusi politik karena dengan mengikuti diskusi politik akan menambah dan meningkatkan pengetahuan tentang perpolitikan serta dapat menanamkan sikap demokrasi kedalam diri masyarakat. Mengenai masyarakat yang nilai kesadaran Politiknya sudah baik harap mempertahankan sikap tersebut sehingga dalam setiap kegiatan pemilihan umum tingkat partisipasi masyarakat akan semakin baik dan bahkan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal dan Buku:

Agustino, Leo. 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabet

Anugrah, Fadil Prasetyo. 2018. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Journal of Politic and Government Studies, Vol. 7, No. 04

Arif, Mukhti & Mulyana, M. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Ternate Selatan). Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol 46, No 1

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Arniti, Ni Ketut. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,Volume 4 Nomor 2

Azmi, Khairul., Puji Astuti, and Fitriyahni. 2016. Perilaku Memilih Pemilih Pemula Masyarakat Kendal Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 5, No. 03

Budiarjo, Miriam . 2007. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Farhan, Ade. 2021. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Kapuk pada Pemilihan Kepala Derah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Febriadi, Herry. 2018. Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Al'Adl, Volume X, No.1.

Febriantanto, Pangky. 2019. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Jurnal PolGov Vol 1 No 1

Ginting, F.P. 2018, Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementasi Parliamentary Treshlod, POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Vol 10 No 2 Hal 79-90

Haris, Syamsudin, (2014). Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. Jurnal Demokrasi Vol IX No 2

Huda, Syaiful. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)

Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan,. 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta, hal.201

Jayani, Riski Dwi. 2017. Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Juliansyah, Andry. 2021. Hubungan Orientasi, Partisipasi Politik Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Walikota Kupang 2017, Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora Volume 1 No 1

Komang Mastini, Bandiyah & Muhammad Ali Azhar, Faktor Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Desa Sidetapa pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Liando, Daud M. 2016. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2

Ly, Petrus. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dulolong dalam Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2018. Gatranusantara, Volume 18 No 1

Maksudi, Iriawan Beddy. 2013. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Mawasti, Wahanani. 2013. Perilaku Memilih Masyarakat Kota Malang dalam Pilwali 2013 Antara Orientasi Kandidat ataukah Orientasi Partai Politik. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Metodius, Masa .2021. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wajomara, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

Meyliana, Inggried Fena & Dewi Erowati. 2020. Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Jurnal Academia Praja Volume 3 No 2.

Muhaling, Arther. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Jurnal Politico, Vol 3 No 2

Mulyadi, Yohanes Berkhmas & Anyan. 2018. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kelam Permai Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 VOX EDUKASI Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , Vol. 9 No. 2

Nanda, Rezki Ferma. 2018. Perilaku Memilih Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Solok Tahun 2015. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Nasution, Faiz Albar. Kushandajani. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)

Prihatmoko, Joko J. 2005.Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahayu, Wiwik Sri. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Di Kota Makassar.

Rakhman, Moh. Arief & Haryadi. 2019. Perilaku dan Partisipasi Politik Generasi Z *(Generation Z's Behavior And Political Participation)*. Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Volume 3 No 1

Rizky Aulia, Rahmat & Firdaus. 2019. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh,Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah ,Volume 4 No 2

Rodin, Asmadi. Lucyane Djafar dan Roni Lukum. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah Tahun 2019. JAMBURA Journal Civic Education , Vol. 1 Nomor 1

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press

Salim, Muhammad Abdus. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)

Sa'ban, LMA., A. Sadat & Nastia. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 No 1

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supriono, Edi. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Mesuji 2017 (Studi di Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)

Surbakti, Ramlan . Memahami Ilmu Politik (2010) Jakarta : PT Grasindo

Suryadi, Budi, (2007). Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep. Yogyakarta: IRCiSoD

Suri, Puti Nilam. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Di Kecamatan Ukui Tahun 2015, JOM FISIP Universitas Riau Vol 4 No 2

Sutrisno, Cucu.2017. Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2 No 2

Tarigan, Marlini. 2009. Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008

Tokan, Frans Bapa. 2019. Analisis Perilaku Memilih pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2017, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 4 No 1

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)

Umami, Riza. Catur Wido Haruni dan Fitria Esfandiari .2021. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades Serentak Tahun 2019, ILREJ, Volume 1, No 1

Utomo, Susilo. 2016. Fenomena Perilaku Memilih pada Pilgub Jateng 2013, Jurnal Ilmu Sosial Vol 15 No 1 Hal 70-83

Widhiasthini, Ni Wayan, dkk. 2019. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Bali. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 8 No 1

Yasa, Achlak Asmara. 2018. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)

Yusuk,Yulius. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Volume 3 No 2

Yustiningrum, RR Emilia & Wawan Ichwanuddin. 2015. Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. Jakarta, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Zuriati, Siti. 2017. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarkat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Tahun 2015

Sumber Lainnya :

BPS Kabupaten Lampung Barat

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2012 Tentang Perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

www. kpu.go.id